



SDGs Desa

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021 PERMEDESA PD TT NO 13/2020





MODEL PEMBANGUNAN NASIONAL DIDASARKAN PADA PERPRES 59/2017: PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)

Mencakup seluruh pertemuan tingkat tinggi pembangunan PBB:

1. Rio Declaration on Environment and Development;
2. World Summit on Sustainable Development;
3. World Summit for Social Development;
4. Programme of Action of the International Conference on Population and Development;
5. Beijing Platform for Action and the United Nations Conference on Sustainable Development;
6. Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries;
7. International Conference on Small Island Developing States;
8. United Nations Conference on Landlocked Developing Countries;
9. Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction.



SDGs

Agenda PBB untuk pembangunan berkelanjutan sampai 2030:
Transforming our world



Pelaksanaan SDGs di Indonesia

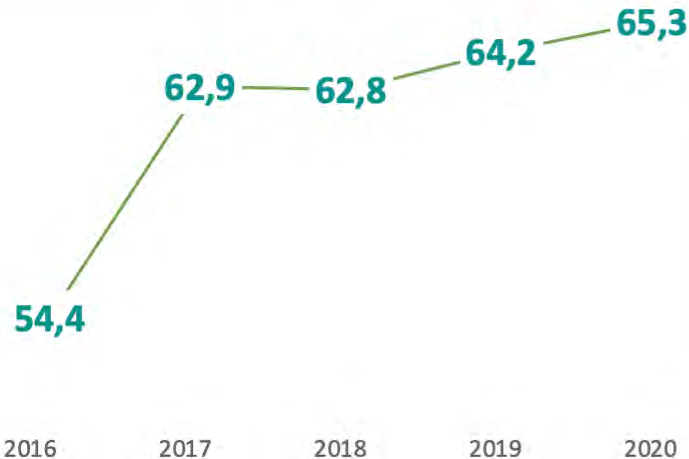
1. Indonesia anggota PBB
2. Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs
3. Indonesia berkomitmen melaksanakan SDGs dalam RPJPN dan RPJMN



PERATURAN PRESIDEN 59 TAHUN 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan

CAPAIAN SDGs INDONESIA

CAPAIAN (%)



RANKING DUNIA



Sumber: Sustainable Development Report 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

- Capaian SDGs Indonesia cenderung meningkat, namun relatif lambat
- Ranking Indonesia dalam pencapaian SDGs mengalami penurunan dari baseline 2016

LATAR BELAKANG KEHADIRAN KEBIJAKAN SDGs DESA

Arahan Presiden Joko Widodo pada
22 Oktober 2019:

1. Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah
2. Dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan, melalui pembangunan desa yang lebih terfokus



"NO ONE LEFT BEHIND"



KONTRIBUSI PERCEPATAN SDGs DESA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN (1)

Aksi SDGs Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan

ASPEK KEWILAYAHAN

- 91% wilayah Indonesia adalah wilayah desa (Kemendagri, 2019)
- 11 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa
- Aksi menuju tercapainya 12 SDGs Desa (7-18) berkontribusi 91% pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (nomor 7-17)

ASPEK KEWARGAAN

- 43% penduduk Indonesia ada di desa (BPS, 2020)
- 6 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan warga desa
- Aksi menuju tercapainya 6 SDGs Desa berkontribusi 43% pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (nomor 1-6)



MODEL PEMBANGUNAN DESA DITURUNKAN DARI SDGs NASIONAL MENJADI SDGs DESA

- Pasal 6: Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data
- Pasal 17: Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional



SDGs Desa

1 DESA TANPA KEMISKINAN



2 DESA TANPA KELAPARAN



3 DESA SEHAT DAN SEJAHTERA



4 PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS



5 KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA



6 DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI



7 DESA BERENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN



8 PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA



9 INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN



10 DESA TANPA KESENJANGAN



11 KAWASAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN



12 KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN



13 DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM



14 DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT



15 DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT



16 DESA DAMAI BERKEADILAN



17 KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA



18 KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021: PENCAPAIAN SDGs DESA



1. **Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa**
 - 1) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 8)
 - 2) penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)
 - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 12)
2. **Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa**
 - 1) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (SDGs Desa 17)
 - 2) Pengembangan Desa wisata (SDGs Desa 8)
 - 3) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa (SDGs Desa 2)
 - 4) Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)
3. **Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3)**



INDIKATOR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021 (1)



1. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%
2. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100%
3. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%
4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%
5. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%



1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%
2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%
3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan



INDIKATOR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021 (2)



1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
2. Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%
3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%
4. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0
5. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0
6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%
7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%
8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100%
9. Persentase perokok ≤ 18 tahun mencapai 0%
10. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT
11. Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial
12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%
13. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100%
14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%
15. Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5



INDIKATOR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021 (3)



1. Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%
2. Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%
4. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%
5. Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun
6. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%
7. APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%
8. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%
9. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%
10. Unmet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis



INDIKATOR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021 (4)



1. keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi >1.200 Kwh/kapita
2. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%
3. Pengguna bauran/campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga
4. Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%



1. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta
2. Pekerja sektor formal minimal 51%
3. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya
4. Tingkat pengangguran terbuka 0%
5. PKTD menyerap >50% penganggur di desa
6. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%
7. Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100%
8. Wisatawanmeningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa



INDIKATOR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021 (5)



1. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga
2. Tersedia unit pengolah sampah



1. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%
2. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan
3. Pekerja anak mencapai 0%
4. Perdagangan manusia mencapai 0%
5. Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0%
6. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik
7. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes
8. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku
9. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi
10. Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%
11. Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100
12. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100%
13. Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%
14. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani



INDIKATOR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021 (6)

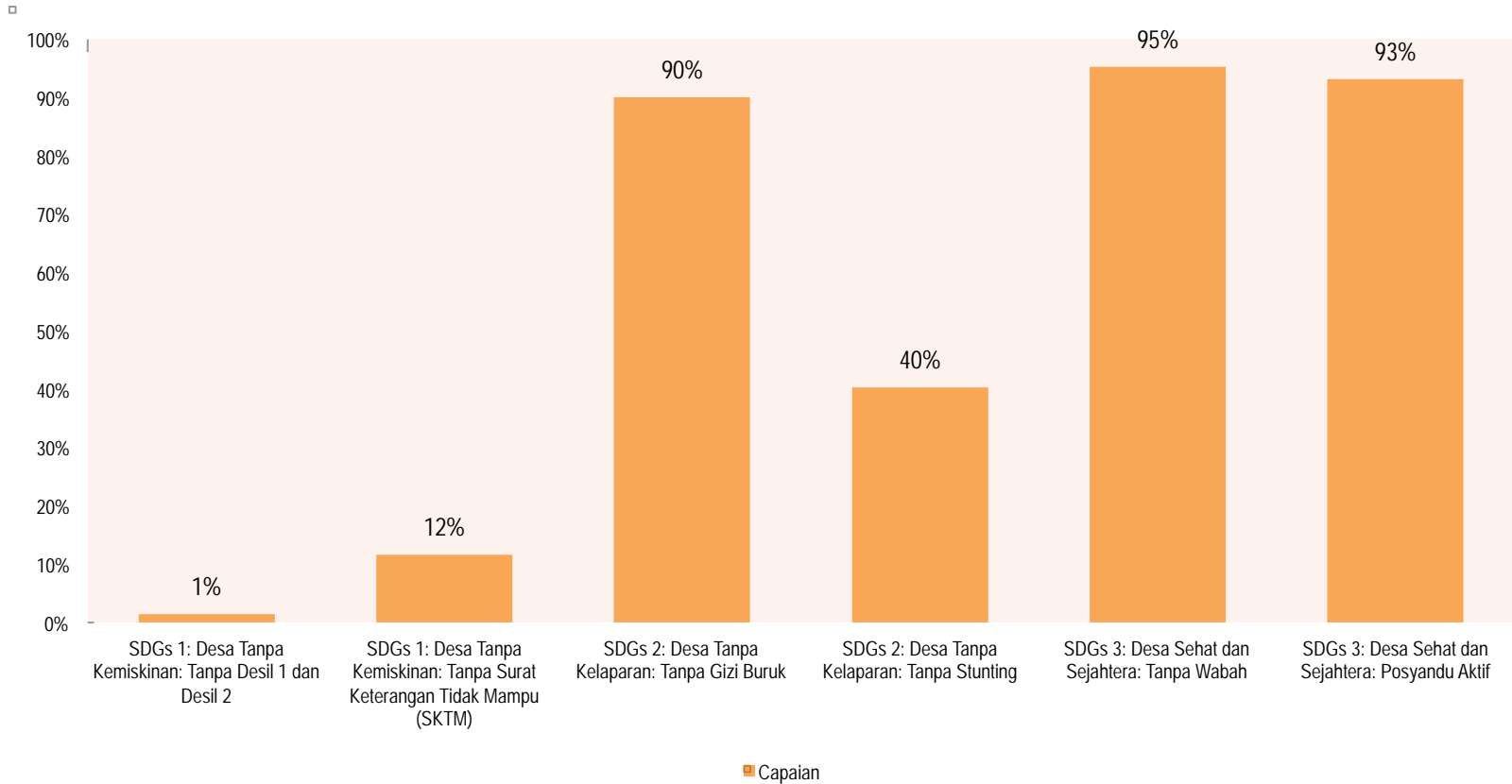
1. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun
2. Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional
3. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi
4. Komoditas desa yang diekspor meningkat
5. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik
6. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa
7. Tersedia data SDGs setiap tahun



1. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama
2. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa
3. Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin
4. SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
5. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun
6. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes
7. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota
8. Bumdes/ma terakreditasi minimal B
9. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif
10. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%
11. Aset desa meningkat
12. Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30%



CONTOH BASELINE SDGs DESA 2019





MEKANISME PENGGUNAAN DANA DESA 2021



Padat Karya Tunai Desa
(PKTD)



Swakelola

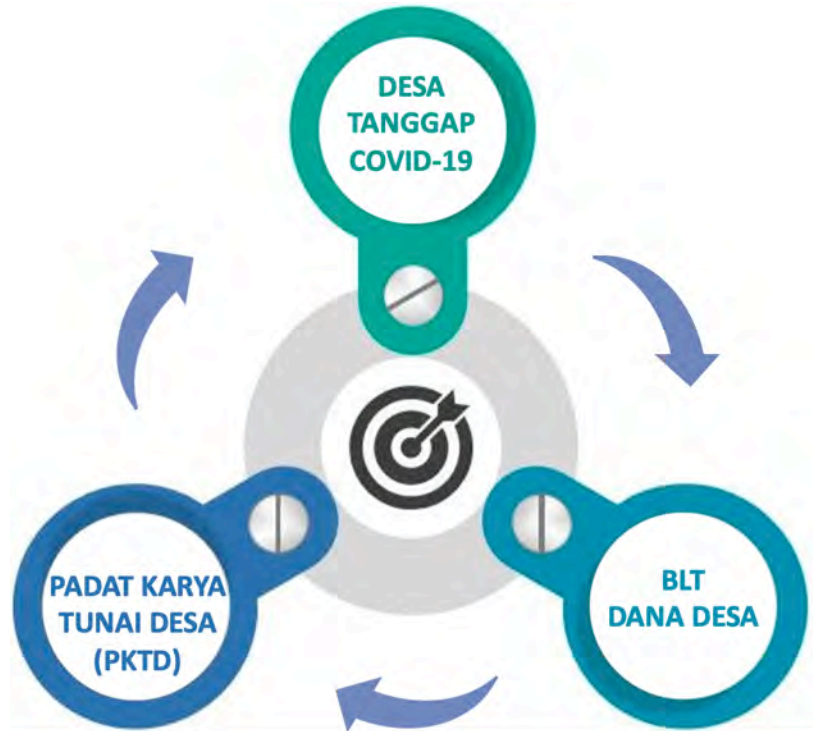


Pembiayaan Permodalan
BUMDes/Ma



KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA 2020

KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020



PENGUNAAN DANA DESA PER 20 SEPTEMBER 2020

Pagu Dana Desa 2020: Rp 71.190.000.000.000

Dana Desa masuk RKDes: Rp 51.466.891.693.262

Penggunaan dana desa selain untuk BLT Dana Desa:

1. Desa Tanggap Covid-19: Rp 3.170.295.090.907

2. Padat Karya Tunai Desa: Rp 5.301.540.206.192

3. Pembangunan infrastruktur lainnya: Rp 3.109.395.640.767

Total: Rp 11.581.230.937.866

Dana desa untuk BLT Dana Desa sampai Desember 2020: Rp 28.461.570.000.000

Total dana desa telah dan akan digunakan: Rp 40.042.800.937.866

Dana Desa dalam APBN: Rp 71.190.000.000.000

Dana Desa telah dan akan digunakan: Rp 40.042.800.937.866

Total Dana Desa dapat segera dibelanjakan: Rp 31.147.199.062.134 dengan rincian :

- Di RKDes: Rp 11.424.090.755.396

- Di RKUN: Rp 19.723.108.306.738

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) PER 20 SEPTEMBER 2020

No	Uraian	Alokasi	Satuan	%
1	Jumlah DD Cair	51.466.891.693.262	rupiah	100%
	Alokasi DD untuk PKTD	5.301.540.206.192	rupiah	10%
2	Besaran Upah	1.296.562.660.938	rupiah	24%
	Besaran Non Upah	4.004.977.545.254	rupiah	76%
3	Jumlah Pekerja	1.089.040	jiwa	100%
	Pekerja Laki-laki	1.011.738	jiwa	93%
	Pekerja Perempuan	77.302	jiwa	7%
	Anggota Rumah Tangga Miskin (RTM)	523.579	jiwa	48%
	Penganggur	242.644	jiwa	22%
	Setengah penganggur	252.284	jiwa	23%
	Kelompok marjinal Lain	9.200	jiwa	1%

KEMAMPUAN SISA DANA DESA UNTUK PKTD DALAM PENURUNAN PENGANGGURAN SEP-DES 2020

Pengangguran di desa = **2.183.837 orang**

Total Dana Desa dapat segera dibelanjakan Sep-Des 2020 untuk PKTD =
Rp 31.147.199.062.134

Jika 55% sisa dana desa digunakan untuk upah PKTD, nilainya =
Rp 17.130.959.484.174

Jumlah HOK = **17.130.959 HOK**

Lazimnya di PKTD 1 orang bekerja 10 hari.

Sehingga, PKTD menyerap **1.713.096 orang** atau **78%** pengangguran desa-desa di Indonesia, dengan upah **Rp 1 juta per kegiatan PKTD**



STANDARD DESA AMAN COVID-19 (1)

1. Kampanye Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

- Penataan berbagai tempat pelayanan publik dan kegiatan masyarakat
- Memasang bahan sosialisasi di tempat terbuka dan mudah diakses masyarakat
- Memasang tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum

2. Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru

- Memakai masker
- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
- Jaga jarak



STANDARD DESA AMAN COVID-19 (2)

3. Membuat regulasi (perdes dan SK Kades) terkait Adaptasi Kebiasaan Baru Desa
4. Merawat sebagian ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
5. Mempertahankan pos jaga desa guna
 - mendata dan memeriksa tamu yang masuk desa
 - mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa
 - mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau
 - merekomendasikan warga desa dari rantau atau warga desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri



PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DESA TANGGAP COVID-19 PER 20 SEPTEMBER 2020

No	Uraian	Alokasi	Satuan
1	Jumlah DD Salur Tahap I	51.466.891.693.262	rupiah
2	Alokasi untuk Covid-19	3.170.295.090.907	rupiah
3	Sosialisasi hidup sehat/lawan covid-19	59.125	desa
4	Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik	56.056	desa
5	Penyemprotan disinfektan	57.154	desa
6	Pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19	56.436	desa
8	Pendirian tempat isolasi	21.292	desa
9	Jumlah tempat tidur yang tersedia	85.168	unit
10	ODP di ruang isolasi	191.610	orang
14	Jumlah masyarakat rentan sakit	119.860	orang
15	Pengadaan masker bagi warga	39.683	desa
17	Jumlah Relawan Desa Lawan Covid-19	1.880.174	orang

PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN 1 s/d 6 dan TOTAL PER 20 SEPTEMBER 2020

Termin	Bulan	Desa Salur	KPM	Rp.
1	Bulan 1	74.146	7.970.652	4.782.391.200.000
2	Bulan 2	72.664	7.696.949	4.618.169.400.000
3	Bulan 3	69.469	7.300.423	4.380.253.800.000
4	Bulan 4	29.792	2.873.600	823.581.701.970
5	Bulan 5	15.056	1.330.991	365.252.544.542
6	Bulan 6	4.905	484.881	126.174.440.000
	Jumlah	74.146	7.970.652	15.095.823.086.512

KEPALA KELUARGA PENERIMA BLT DANA DESA 20 SEPTEMBER 2020

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani dan buruh tani	7.014.174	88%
2	Nelayan dan buruh nelayan	323.703	4%
3	Buruh pabrik	163.398	2%
4	Guru	68.780	1%
5	Pedagang dan UMKM	400.597	5%
	Jumlah	7.970.652	100%

- Keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa: 7.970.652
- antara lain meliputi:
 - 2.470.902 KPM adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA)
 - 286.163 KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun



DESA POTENSIAL KEKURANGAN DANA DESA UNTUK BLT DANA DESA PADA DESEMBER 2020

- Jumlah yang potensial kekurangan dana desa untuk BLT Dana Desa
 - 1.119 desa
 - 192.691 KPM
 - Rp 146,1 miliar
- 192.691 KPM BLT Dana Desa tersebut dialihkan menjadi penerima bantuan sosial dari Kemensos mulai Oktober 2020

CALL CENTER



0811-1953-5201

0811-1953-5202



Integrasi SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024

VISI 2045

INDONESIA 2045

Berdautat, Maju, Adil Dan Makmur

2020-2024



Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

TEMA



Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA

FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI

FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial

SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Karakter Bangsa

Pangan

Energi

Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital

Industri Manufaktur

Kelautan dan Kemaritiman

Sentra-Sentra Pertumbuhan

Komoditas Unggulan Daerah

Pertumbuhan Perkotaan

Transportasi

Telekomunikasi

Sumber Daya Air

Perumahan dan Pemukiman

Hukum dan Regulasi

Pertahanan dan Keamanan

Politik

Development Constraints :

Kondisi Pembiayaan

Kondisi Sumber Daya Alam

PENGARUSUTAMAAN

5 KESETERAPAN GENDER

Kesetaraan Gender

16 PERANGKAP KEBERLAKSANAAN YANG TANGGUNG

Tata Kelola (Governance)

Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

3 KESEHATAN DAN KEMAMPUAN SAHAM

4 KEMAMPUAN SAHAM

5 KESETERAPAN GENDER

Modal Sosial Budaya

9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan Berbasis Teknologi Digital

Kaidah Pembangunan :

Membangun Kemandirian

Menjamin Keadilan

Menjaga Keberlanjutan



Kesesuaian RPJMN 2020-2024 dengan SDGs

Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan



3. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas



2. Karakter Bangsa



1. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



4. Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan



5. Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



6. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



7. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

